

PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM BERBASIS LINGKUNGAN

Oleh:
Nurul Khotimah
Jurusan Pendidikan Geografi, FISE UNY

Abstrak

Berbagai upaya untuk meningkatkan devisa negara dari aspek pariwisata, terutama pariwisata yang mengeksplorasi alam semakin digencarkan, baik wisata bahari, wisata pegunungan, wisata hutan, suaka alam, dan suaka margasatwa tanpa memperhatikan penurunan kualitas lingkungan yang mengancam kelestarian lingkungan itu sendiri. Penurunan kualitas lingkungan dapat dilihat dari unsur-unsur lingkungan abiotik, biotik, dan kultur yang terpengaruh oleh aktivitas pariwisata yang berlangsung, misalnya sampah, vandalisme, pendirian hotel, penginapan, perusakan biota alam, maupun dampak yang lain.

Oleh karena itu pariwisata yang mengeksplorasi alam harus berbasis lingkungan dan pengelolaan yang terpadu, yaitu dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi melalui pendekatan ekosistem. Seluruh kegiatan pariwisata harus mempertimbangkan keberadaan ekosistem yang ada demi kelestarian hidup yang ada dan menjaga kualitas lingkungan. Perlunya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan wisata alam yang berbasis lingkungan bertujuan menjaga kelestarian lingkungan dan tetap mempertahankan berlangsungnya kegiatan pariwisata alam sehingga mampu mendongkrak devisa negara.

Kata Kunci: Pariwisata Alam, Lingkungan

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi alam yang sangat besar, baik potensi bahari, potensi hutan/flora, potensi hewan/fauna, potensi sejarah maupun potensi sosial kebudayaan yang dapat dijadikan modal untuk pariwisata alam yang berbasis lingkungan. Laut yang luas dengan berbagai tipe pantai dari yang berpasir putih, berbatu, bertebing, berlumpur dengan mangrovenya, atapun pantai dengan gumuk pasir seperti yang terdapat di Parangtritis Bantul Yogyakarta. Hutan dengan berbagai flora yang heterogen, seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau yang lain dengan daya tarik yang luar biasa

untuk wisata petualangan. Suaka margasatwa dengan binatang badak, harimau jawa, harimau sumatera, orang hutan, burung cendrawasih tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sosial kebudayaan berbagai suku bangsa di Indonesia merupakan aset budaya yang tak ternilai harganya. Semuanya itu merupakan potensi yang perlu dikelola untuk meningkatkan devisa negara melalui kepariwisataan.

Perkembangan pariwisata yang begitu pesat di berbagai negara telah mampu menjaga keberlanjutan dan ketahanan perekonomian nasional. Beberapa negara tetangga, diantaranya Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan Republik Rakyat Cina (RRC) mengandalkan sektor pariwisata sebagai lokomotif pemulihan ekonomi nasional ketika mengalami krisis (Widibyo, 2002). Di Indonesia, pengembangan pariwisata penting mengingat kontribusinya cukup besar dalam perekonomian nasional, baik dalam bentuk perolehan devisa negara, pendorong pembangunan daerah, penyediaan lapangan kerja, dan mendorong perkembangan sektor lain.

Untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengelolaan pariwisata yang berbasis lingkungan. Hal ini akan meningkatkan kualitas lingkungan yang dijadikan sebagai obyek dan daya tarik wisata, selain untuk menjaga kelestarian lingkungan itu sendiri. Pengelolaan pariwisata yang berbasis lingkungan untuk dikelola menjadi sumber devisa negara akan menarik pihak investor untuk menanamkan modalnya. Demi keberlangsungan pariwisata maka investor akan mendirikan berbagai fasilitas, dengan kata lain untuk mencari keuntungan dalam kegiatan pariwisata alam yang ada. Investor inilah yang perlu diatur dalam kebijakan yang berupa perundang-undangan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pariwisata tersebut.

Pariwisata

Pariwisata (*tourism*) adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu (Spillane, 1991), sedangkan menurut Haryono dalam Sujali (1989), pariwisata merupakan kegiatan atau aktivitas manusia dan sebagai suatu pernyataan dari usaha-usaha manusia untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan hidupnya.

Kenyataan menunjukkan, meskipun Indonesia mempunyai potensi wisata yang cukup besar dan melimpah, baik potensi alam, potensi budaya dan karya pariwisata, namun pengembangan kepariwisataan di Indonesia

masih belum optimal. Hal ini kemungkinan disebabkan karena 2 (dua) faktor, *pertama* pemerintah masih menganaktirikan sektor pariwisata sehingga mengakibatkan kinerja sektor pariwisata terbengkalai dan tertinggal dari negara lainnya, dan *kedua* rendahnya kesadaran khususnya kesadaran elite politik dan masyarakat luas tentang arti penting sektor pariwisata sehingga kenyamanan wisatawan terganggu (Widiby, 2002).

Pengelolaan objek wisata belum dilakukan secara profesional, sehingga tidak akan mendorong tumbuh kembangnya industri pariwisata secara menyeluruh yang diharapkan dapat menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat, memperluas dan pemeratakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mendukung perolehan Pendapatan Asli Daerah secara optimal, serta membawa citra daerah tersebut.

Pariwisata merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu pariwisata juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sekitarnya karena dapat membuka kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan. Pariwisata merupakan industri yang menjual produk berupa lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan biologis maupun lingkungan sosial budaya. Ketiga aspek tersebut tidak berdiri sendiri, namun membentuk suatu komponen yang utuh dan saling mempengaruhi di antara unsur-unsur tersebut dalam satu sistem ekologi atau ekosistem.

Landasan kepariwisataan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, yaitu:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
4. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
5. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan/mengusahakan objek wisata dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
6. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

7. Kawasan wisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Pengembangan kepariwisataan di Indonesia menitikberatkan pada kegiatan manusia untuk melakukan perjalanan agar tercapai kehidupan yang menyenangkan dan memperkaya kehidupan hendaknya tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, sehingga penerapan konsep pariwisata yang berkelanjutan dapat diterapkan.

Pariwisata Alam

Menurut Ditjen Pariwisata Republik Indonesia (Sujali, 1989), sebuah usaha pariwisata harus memiliki modal atau bahan dasar yang dapat diolah untuk dipasarkan sehingga dapat terus berkembang. Bahan dasar yang dimaksudkan adalah objek wisata yang dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Objek wisata alam (*natural resources*)
Bentuk dari objek wisata alam berupa objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam (pegunungan, pantai, dan sebagainya) serta flora dan fauna.
2. Objek wisata budaya/manusia (*human resources*)
Bentuk dari objek wisata budaya/manusia adalah objek-objek wisata yang berwujud hasil seni budaya setempat, misalnya adat-istiadat, upacara agama, tata hidup masyarakat, peninggalan sejarah, serta hasil seni dan kerajinan masyarakat.
3. Objek wisata buatan manusia (*man made resources*)
Bentuk dari objek wisata buatan manusia sangat tergantung pada kreativitas manusia, antara lain berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata petualangan, wisata buru, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Andalan kepariwisataan di Indonesia adalah wisata alam, karena Indonesia merupakan negara dengan kondisi yang sangat heterogen dalam hal topografi dan morfologi bentang alamnya, misalnya berupa hutan, pegunungan, pantai, danau, gua, suaka margasatwa, dan objek wisata yang menggunakan basis keindahan lingkungan sekitar manusia.

Permasalahan Pengelolaan Pariwisata Alam

Pendit (1999) menyebutkan 10 unsur-unsur pokok yang harus ada dalam industri pariwisata, yaitu politik pemerintah, perasaan ingin tahu, sifat ramah tamah, jarak dan waktu, atraksi, akomodasi, pengangkutan, harga-harga, publisitas dan promosi, serta kesempatan berbelanja.

Kesepuluh unsur tersebut nantinya akan mempengaruhi bentuk pariwisata yang dilakukan wisatawan. Bentuk pariwisata dapat dibedakan berdasarkan kriteria tertentu, antara lain:

1. Menurut asal wisatawan, dikenal sebutan pariwisata domestik (nusantara) dan pariwisata internasional (mancanegara).
2. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran, dikenal sebutan pariwisata aktif dan pariwisata pasif.
3. Menurut jangka waktu, dibedakan menjadi pariwisata jangka pendek dan pariwisata jangka panjang.
4. Menurut jumlah wisatawan, dibedakan menjadi pariwisata perorangan (tunggal) dan pariwisata rombongan (kolektif).
5. Menurut alat angkut yang dipergunakan, dibedakan menjadi pariwisata udara, laut, kereta api dan mobil.

Soemarwoto (2001), menyebutkan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu kawasan wisata, antara lain:

1. Daya dukung lingkungan

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan suatu wilayah untuk menerima wisatawan yang dipengaruhi dua faktor utama, yaitu tujuan wisatawan dan faktor lingkungan. Dengan adanya pariwisata yang memperhatikan daya dukung lingkungan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan kemungkinan rusaknya ekosistem dapat dihindari, sehingga mampu mempercepat perkembangan pariwisata.

2. Keaneka-an

Dalam pengembangan pariwisata keaneka-an harus dijaga mengingat keinginan dan selera wisatawan yang berbeda-beda. Keaneka-an yang disesuaikan dengan tujuan wisatawan cukup penting karena diperlukan untuk menentukan pilihan. Derajat kebebasan untuk memilih merupakan salah satu faktor untuk menentukan mutu lingkungan. Dalam hal ini pilihan wisatawan sangat dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, mode, pendidikan dan kebudayaan.

3. Keindahan alam

Keindahan alam merupakan unsur penting dalam kepariwisataan, misalnya bentang alam baik bentang alam alamiah maupun bentang alam yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Kerusakan dan tidak terpeliharanya keindahan bentang alam akan menurunkan daya tarik daerah wisata.

4. Vandalisme

Vandalisme merupakan kegiatan manusia yang merusak lingkungan, seperti merusak tatanan sosial budaya yang ada, bangunan-bangunan bersejarah dan kelestarian alam. Adapun bentuk vandalisme yang sangat umum adalah mencoret-coret tempat-tempat tertentu seperti candi, gedung, maupun pepohonan. Kegiatan ini termasuk merusak lingkungan baik dilihat secara estetika maupun nilai historis dari objek itu sendiri yang akhirnya akan merugikan kegiatan pariwisata.

Beberapa permasalahan pokok dengan adanya kegiatan pariwisata dengan mengeksplorasi potensi alam adalah menurunnya kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan wisata akibat adanya aktivitas pariwisata yang dilakukan.

Pengelolaan Pariwisata Berbasis Lingkungan

Pariwisata sebagai salah satu jenis industri mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, standar hidup, serta menstimulasi faktor-faktor produktivitas lainnya (Pendit, 1999). Keberadaan pariwisata sebagai suatu industri juga mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain, seperti industri kecil dan industri kerajinan tangan di pedesaan. Pertumbuhan ini akan mengakibatkan bertambahnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat pedesaan.

Perkembangan pariwisata dapat memberikan manfaat yang cukup besar, tetapi perkembangan tersebut juga mengandung risiko yang tidak kecil. Manfaat yang diperoleh serta risiko yang mungkin timbul tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat diusahakan suatu bentuk perencanaan pariwisata yang mampu memperoleh manfaat secara optimal tanpa harus mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Keberhasilan pengembangan pariwisata pada awalnya seringkali diukur dengan besarnya perolehan devisa dan bertambahnya jumlah fasilitas wisata, namun pada masa sekarang konsep ini sudah tidak relevan lagi, terutama dengan berkembangnya isu kepentingan lingkungan. Secara konseptual, pariwisata berkelanjutan dilandasi oleh upaya pemberdayaan, baik dalam arti sosial, ekonomi maupun budaya sehingga merupakan suatu model pariwisata yang mampu merangsang tumbuhnya kualitas sosio-kultural dan ekonomi masyarakat serta menjamin kelestarian lingkungan (Putra, 2000). Oleh karenanya diperlukan beberapa pendekatan untuk pengembangan pariwisata yang berbasis lingkungan, yaitu:

1. Pendekatan “sebab”

Pendekatan sebab ditujukan untuk mengetahui penyebab terjadinya perubahan lingkungan atau degradasi lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi masalah dari berbagai komponen, antara lain: lahan, air, udara, penduduk, dan kelembagaan.

2. Pendekatan kelingkungan dan kewilayahan (pendekatan geoekosistem)

Dalam pendekatan ini, penyelesaian masalah didekati dengan kewilayahan dan kelingkungan serta sedapat mungkin mengarah ke kesatuan ekosistem.

3. Pendekatan keterpaduan program

Pendekatan keterpaduan program diarahkan untuk mengintegrasikan kebijaksanaan, persepsi terhadap suatu masalah, dan keterpaduan alternatif program pengelolaan lingkungan. Keterpaduan program dicapai dengan cara kegiatan partisipatif mulai dari penggalangan dukungan, penyahihan informasi, identifikasi masalah, dan penetapan program.

Pendekatan sebab bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pariwisata alam sehingga dapat disusun kegiatan-kegiatan prioritas untuk pemulihan kerusakan dan kualitas lingkungannya. Hal ini dikarenakan pariwisata sangat peka terhadap kerusakan lingkungan, misalnya akibat pencemaran limbah domestik yang berbau dan kotor, sampah yang bertumpuk, dan kerusakan pemandangan oleh penebangan hutan, gulma air di danau, gedung yang letak dan arsitekturnya tidak sesuai, serta sikap penduduk yang tidak ramah lingkungan (Soemarwoto, 2001). Kelestarian suatu lingkungan perlu untuk diperhatikan, mengingat lingkungan dengan berbagai unsurnya merupakan sumberdaya wisata. Di lain pihak, pariwisata juga dapat menjadi penyebab timbulnya permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pariwisata secara tidak langsung akan menurunkan potensi pariwisata di suatu daerah karena nilai estetika lingkungan di daerah wisata tersebut juga akan menurun (Soemarwoto, 2001).

Pendekatan geoekosistem dapat digunakan untuk mengetahui potensi sumberdaya lahan dan daya dukung lingkungan, baik lingkungan fisik, biotik, maupun lingkungan sosial budaya yang saling berkaitan. Dalam struktur geoekosistem ketiga aspek tersebut mempunyai hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Apabila salah satu aspek rusak, maka kualitas lingkungan akan menurun sehingga akibatnya jumlah wisatawan juga akan menurun. Aspek lingkungan fisik meliputi letak, luas, dan batas administrasi, iklim, geomorfologi, geologi, tanah, hidrologi, penggunaan

lahan, dan infrastruktur. Aspek biologis meliputi keadaan flora-fauna, sedangkan aspek sosial budaya terdiri dari keadaan penduduk, atraksi wisata, dan nilai/norma adat-istiadat.

Pengelolaan kepariwisataan di Indonesia agar tidak menimbulkan masalah terhadap penurunan kualitas lingkungan maka perlu pengelolaan secara TERPADU atau menggunakan pendekatan keterpaduan program yang meliputi: PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI. Pengelolaan secara terpadu meliputi beberapa hal sebagai berikut, antara lain:

1. Rencana pendayagunaan potensi wisata alam

Sebuah kawasan untuk dijadikan sebagai kawasan wisata alam harus mempunyai perencanaan pendayagunaan potensi wisata alam yang ada. Tidak adanya perencanaan yang matang maka pengelolaan akan menemui berbagai masalah terutama permasalahan lingkungan itu sendiri. Permasalahan sebenarnya bersumber dari ketidaksiapan berbagai aspek yang saling terkait dan mempengaruhi dalam kegiatan pariwisata, yaitu objek wisata, pelaku wisata, dan pendukung wisata.

2. Penetapan wilayah wisata alam

Penetapan kawasan atau wilayah yang digunakan sebagai objek wisata merupakan faktor terpenting dalam pengelolaan wisata alam yang berbasis lingkungan. Kawasan wisata alam biasanya terkait dengan penetapan pemerintah tentang kawasan lindung, kawasan suaka, taman nasional, dan penetapan kawasan lainnya yang berkaitan dengan kelestarian flora ataupun fauna tertentu. Penetapan kawasan selain untuk melindungi flora dan fauna juga melindungi fungsi kawasan tertentu, misalnya kawasan resapan. Penetapan kawasan atau wilayah wisata alam seperti ini berkaitan dengan suatu kepentingan yang tidak hanya untuk kelestarian alam maupun pariwisata, tetapi ada kalanya juga berkaitan untuk menghindari konflik kepentingan berbagai pihak yang akan memanfaatkan suatu kawasan tertentu, misalnya untuk pertambangan, perambahan hutan, dan *illegal logging*.

Penetapan suatu kawasan harus mempertimbangkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, PP No. 82 Tahun 2001 tentang PKA & PPA, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, meliputi: keseimbangan dan pendayagunaan air, konservasi air (perlindungan, pelestarian dan pengawetan), pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran air, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, meliputi: penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berdasarkan tata guna tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan, PP No. 47 Tahun 1997 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional, antara lain sempadan sungai (10 – 15 m, 50 m, 100 m) dan sekitar mata air, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

3. Pemantauan kualitas lingkungan kawasan wisata alam

Suatu kawasan yang telah dikelola untuk kepentingan tertentu akan mempengaruhi unsur-unsur lingkungan yang ada, baik unsur abiotik, unsur biotik, maupun unsur kulturalnya. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan kawasan wisata alam tersebut. Pemantauan kualitas lingkungan sangat diperlukan secara periodik untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada. Pemantauan dapat bersifat instansional pemerintah maupun kelembagaan masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat.

4. Penghitungan daya dukung lingkungan

Suatu kawasan untuk dijadikan sebuah kawasan wisata alam harus diperhitungkan masalah daya dukung lingkungannya. Daya dukung ini diperlukan untuk kelangsungan program pariwisata alam tersebut. Daya dukung lingkungan meliputi atraksi budaya, objek dan daya tarik wisata alam, masyarakat sekitar, aksesibilitas, market, promo, dan informasi. Penghitungan daya dukung lingkungan untuk kepentingan tertentu seperti pariwisata memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dengan AMDAL maka seluruh daya dukung lingkungan dapat terinventarisasi kekurangan maupun kelebihan.

5. Mekanisme perizinan

Kawasan wisata alam dengan daya dukung lingkungannya akan menarik investor yang akan ikut andil dalam pengelolaan wisata tersebut. Oleh karena itu perizinan suatu usaha, baik perizinan hotel, pasar, jual beli dan seluruh kegiatan yang mengarah pada pengelolaan pariwisata harus melalui perizinan yang ketat. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengelolaan pariwisata yang tidak terpantau dan menyalahi bahkan cenderung merusak lingkungan, misalnya permasalahan yang terjadi di kawasan Puncak Bogor dengan berdirinya ratusan villa maupun penginapan yang bersifat pribadi dan didirikan di kawasan resapan. Hal tersebut sebenarnya tidak akan terjadi apabila proses perizinan yang ada benar-benar ditaati.

Untuk menghindari hal tersebut diperlukan adanya kebijakan daerah, yang meliputi:

1. Pengembangan keserasian aktivitas pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2. Peningkatan upaya rehabilitasi atau pemulihan dan konservasi fungsi sumberdaya air dan lingkungan hidup yang telah rusak serta pengendalian pencemaran lingkungan.
3. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.
4. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan lingkungan hidup.
5. Pengembangan dan penerapan peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai kewenangan daerah.
6. Peningkatan perhatian dan komitmen berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kebijakan suatu daerah apabila dilakukan dengan baik, maka pengelolaan pariwisata yang berbasis lingkungan dapat terwujud dan kualitas lingkungan akan terjaga kelestariannya. Oleh sebab itu diperlukan strategi pengelolaan pariwisata yang berbasis pada lingkungan, yang meliputi:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pemantapan tata ruang (RTRW/RDTRK) dan pengamanan kawasan yang berfungsi lindung.
3. Menterpadukan kegiatan lintas sektor dan lintas daerah, baik pada aspek pengendalian kerusakan maupun pada aspek pengendalian pencemaran lingkungan berbasis ekosistem.
4. Rehabilitasi dan pemulihan kualitas lingkungan akibat kerusakan maupun pencemaran lingkungan.
5. Peningkatan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan lingkungan.
6. Peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata alam.

Kesimpulan

Ada beberapa istilah yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan pariwisata, antara lain wisata, wisatawan, pariwisata, kepariwisataan, usaha pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, dan kawasan wisata. Sebuah usaha pariwisata menurut Ditjen Pariwisata Republik Indonesia (Sujali, 1989), memiliki 3 (tiga) modal atau bahan dasar yang dapat diolah untuk dipasarkan sehingga dapat terus berkembang, yaitu obyek wisata alam, obyek wisata budaya/manusia, dan obyek wisata buatan manusia. Obyek wisata alam merupakan andalan kepariwisataan Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat heterogen dalam hal topografi dan morfologi bentang alamnya.

Permasalahan yang dihadapi kegiatan pariwisata yang mengeksplorasi potensi alam adalah menurunnya kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan wisata. Untuk mengantisipasinya maka pengembangan pariwisata harus berkelanjutan dan dilandasi upaya pemberdayaan, baik dalam arti sosial, ekonomi maupun budaya serta menjamin kelestarian lingkungan. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang terpadu untuk pengembangan pariwisata alam berbasis lingkungan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi melalui pendekatan ekosistem. Dalam hal ini seluruh kegiatan pariwisata alam harus mempertimbangkan keberadaan ekosistem demi kelestarian hidup dan menjaga kualitas lingkungan. Adanya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan pariwisata alam berbasis lingkungan dapat menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan keberlangsungan kegiatan pariwisata alam sehingga mampu mendongkrak devisa negara.

Daftar Pustaka

- Pendit, N.S. 1999. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang PKA & PPA.
- Putra, Hedy Shri Ahimsa. 2000. *Potensi dan Prospek Pengembangan Desa Wisata di D.I. Yogyakarta*, makalah dalam Pembinaan Bagi Pengelola Objek Wisata se DIY. Yogyakarta.
- Soemarwoto, Otto. 2001. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Spillane, James J. 1991. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sujali. 1989. *Geografi Pariwisata dan Kepariwisataaan*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Widibyo. 2002. *Pariwisata sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional*. Suara Pembaharuan tanggal 14 Mei 2002.